

DAFTAR BACAAN

A. Sumber Buku

- Arif, M. Isa. 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta : Intermedia.
- Doyle, Robert A dan Steve Baska. 2002. *History of Auctions: From ancient Rome to today's high-tech auctions, Auctioneer*, archived from the original on 2008-05-17, retrieved 2008-06-22.
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Digital*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M.Yahya. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. cet.II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Pertama. Malang. Bayumedia Publishing
- Isnaeni, Moch. 2014.*Hukum Benda Dalam Burgerlicjk Metwboek*.Surabaya: PT Revka Petra Media.
- , 2014.*Lembaga Jaminan Kebendaan dalam Burgerlijk Wetboek*.Surabaya: PT Revka Petra Media.
- , 2014.*Perjanjian Jual Beli*.Surabaya: PT Revka Petra Media.
- , 2014.*Pijar Pendar Hukum Perdata*.Surabaya: PT Revka Petra Media.
- , 2014.*Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*.Surabaya: PT Revka Petra Media.
- , 2014.*Seberkas Diorama Hukum Kontrak*.Surabaya: PT Revka Petra Media.
- , 2014.*Selintas Pintasan Hukum Perikatan (Bagian Umum)*.Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Kamarinjani. 1978. *Sejarah Perusahaan-perusahaan Teh di Indonesia 1824-1924*. Jakarta: LIPI.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. cetakan ketujuh Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Cetakan ke-2, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kasali , Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Krishna, Vijay. 2002. *Auction Theory*, San Diego, USA: Academic Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. *Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, Jakarta, Tim akubaca.
- Prayudi, Guse. 2008. *Jaminan dalam Perjanjian Utang-Piutang*. cet. I. Yogyakarta:Merkid Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata, Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung.

- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sianturi, Purnama Tioria. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Cet.1 Bandung : CV Mandar Maju
- Sianturi, Purnama Tioria. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Cet.2 Bandung : CV Mandar Maju
- Siregar, Walter (Penterjemah). 1951. *Rechtsgeleerd Handwoorddenboek*. Jakarta:N. V. Gronogen
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok, dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. cet. I. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soemitro, Rochmat. 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. cet. 1. Bandung: PT.Eresco Bandung.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2003. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Srivastava, Samir K. 2012. *Managerial Implications from Indian Case Studies on e-Reverse Auctions*", *Business Process Management Journal*, 18(3)
- Subekti, R. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Sumber Laporan, Penelitian, dan Makalah.

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produksi Perikanan Laut yang Dijual di Tempat Pelelangan Ikan*.
- Direktorat Lelang. 2016. *Laporan Hasil studi banding Direktorat Lelang di Kantor Wilayah VIII Pegadaian Jakarta I*.
- Direktorat Lelang. 2018. *Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Semester I 2018*. Jakarta.
- Sanjaya, Adam Wira dkk. 2015. *Makalah Lelang Ikan*. Makalah. Tidak Diterbitkan. STAN-Prodip III Pengurusan Piutang Negara dan Lelang: Tangerang

Simarwata, Budiman Tua. 2011. *Kemampuan Pelelangan Hasil Tangkapan Oleh Pengelola Tempat Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Jakarta*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Institut Pertanian Bogor: Bogor.

C. Sumber Jurnal dan Majalah

Buletin Komisi Yudisial, (vol. 1 Nomor 6, Juni 2007) Komisi Yudisial, Jakarta 2007 Indonesia. Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Brosur Pasar Lelang Komoditas, Memperpendek Mata Rantai Perdagangan*, 2017.

Margono Dwi Susilo, *Optimalisasi Pemanfaatan BMN/D Dengan Lelang Hak Untuk Menyewa BMN/D*, Media Kekayaan Negara, Edisi No.25 Tahun VIII/2017, hal.36

Margono, Dwi Susilo. 2015. *Bahan Ajar Perkuliahan PKN-STAN Spesialisasi PPLN/Managemen Aset*

R Preston McAfee dan John McMillan dalam *Journal of Economic Literature*, vol 25 No.2 (Juni 1987).

D. Sumber Kamus dan Ensiklopedia

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

Garner, Bryan A. (editor in chief). 2004. *Black's Law Dictionary (8th ed 2004)*.

Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. cetakan pertama. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mahkamah Agung RI, Buku II tentang Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, edisi 2007.

Marbun, B.N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : . Pustaka Sinar Harapan.

Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita

E. Sumber Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.

Indonesia. Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.

Indonesia. Undang-Undang Panitia Urusan Piutang Negara, UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960, LN Nomor 156 Tahun 1960, TLN Nomor 2104.

- Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, UU Nomor 6 Tahun 1983, LN Nomor 126 Tahun 2000, TLN Nomor 3984.
- Indonesia. Undang-Undang Kepabeanan, UU Nomor 10 Tahun 1995, LN Nomor 75 Tahun 1995, TLN Nomor 3612.
- Indonesia. Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, UU Nomor 4 Tahun 1996, LN Nomor 42 Tahun 1996, TLN Nomor 3632.
- Indonesia. Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889.
- Indonesia. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443.
- Indonesia. Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, LN Nomor 126 Tahun 2000, TLN Nomor 3984.
- Indonesia. Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999, LN Nomor Tahun 1999, TLN Nomor 3851.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. UU Nomor 5 Tahun 1999
- Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Militer. UU Nomor 31 Tahun 1997
- Indonesia. Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perdagangan. UU Nomor 7 Tahun 2014.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perikanan. UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara. UU Nomor 19 Tahun 2008.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Surat Utang Negara. UU Nomor 24 Tahun 2002
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UU Nomor 18 Tahun 2013
- Indonesia. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

- Indonesia. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. UU Nomor 9 Tahun 2016.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi. UU Nomor 2 Tahun 2017.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2006.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
- Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PMK Nomor: 40/PMK.07/2006.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama, PMK Nomor 134/PMK.08/2013.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PMK Nomor: 27/PMK.06/2016.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Harga Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, PMK Nomor: 90/PMK.06/2016.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, PMK Nomor 78/PMK.06/2014.
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Malaysia. Undang-Undang Penjualan Lelang Malaysia dikenal dengan Auction Sales Enactment tahun 1929.
- New South Wales, Public Sector Employment and Managemen Act 2002 No.43.
- New South Wales, Guidelines Reverse Auction NSW, 2006.
- Pandhuis Reglement, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81.
- Tiongkok. Undang-Undang Lelang Republik Rakyat Tiongkok 5 Juli 1996

Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3.

Vendu Instructie, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3.

F. Sumber Internet

Besar. *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>. Diakses 26 Nopember 2018.

Candra dan Della Kusuma. 2008. *Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Kerjasama*. www.adln.lib.unair.ac.id. Diunduh 25 September 2009.

Detikinet. 2017. *Ini Syarat Ikut Lelang Frekuensi 21 dan 23 Ghz*. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-3664444/ini-syarat-ikut-lelang-frekuensi-21-dan-23-ghz>. Diakses 28 September 2018

Kartika, Herlina. 2018. *Kemkop akan kembalikan koperasi perikanan sebagai penyelenggara lelang ikan*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-akan-kembalikan-koperasi-perikanan-sebagai-penyelenggara-lelang-ikan>. Diakses 8 Oktober 2018.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara Atau Sukuk Negara*. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2253>. Diakses 28 September 2018

Khoirul. *Hukum Kontrak*. <http://sunan-ampel.ac.id>. Diunduh 14 Oktober 2009.

Majalah Arkeologi Indonesia. *Jual Ikan Dengan Sistem Lelang*. <https://hurahura.wordpress.com/2012/05/16/jual-ikan-dengan-sistem-lelang/>. Diakses 04 Oktober 2018.

Nasution, Edi. *Memahami Praktek Pencucian Uang Hasil Kejahatan*. http://www.ppatk.go.id/files/MemahamiPraktekPencucianUangHasilKejahatan_28Oktober20110.pdf. Diakses tanggal 12 Oktober 2018.

Pegadaian. *Pegadaian Dari Masa ke Masa*. <http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php>. Diakses 04 Oktober 2018.

Pelajaran. 2017. *Pengertian Jasa Menurut Ahli, Karakteristik, Klasifikasi, dan Jenis Jasa Terlengkap*. <https://www.pelajaran.id/2017/21/pengertian-jasa-menurut-ahli-karakteristik-klasifikasi-dan-jenis-jasa-terlengkap.html>. Diakses 3 Oktober 2018.

Ramelan. *Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Huku Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

- <http://www.legalitas.org/?q=node/227>. Diunduh 14 Oktober 2009.
- Sepengetahuan. 2015. *Pengertian Jasa Menurut Para Ahli*. <https://www.sepengetahuan.co.id/2015/08/6-pengertian-jasa-menurut-para-ahli-terlengkap.html>. Diakses 3 Oktober 2018.
- Sidharta, *Teori Hukum Integratif Dalam Konstelasi Pemikiran Filsafat Hukum (interpretasi atas sebuah teori rekonstruksi)*. <http://shidarta-articles.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-integratif-dalam-konstelasi.html>. Diakses 11 Desember 2018.
- Stefin, Adie Martin. *Kebatalan Mutlak, Absolute, Nietigheid*. <http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/12/kebatalan-mutlak-absolute-nietigheid.html>. Diakses tanggal 2 Oktober 2018.
- Susillo, Margono Dwi. 2017. *Lelang Zaman Now, Jangan Berhenti Berinovasi*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12633/Lelang-Zaman-Now-Jangan-Berhenti-Berinovasi.html>. Diakses 12 Oktober 2018.
- Tenziku. *Metode Analisis Data*. www.scribd.com. Diunduh 25 September 2009.
- Wikipedia. [http://id.wikipedia.org/wiki/efisiensi_\(ekonomi\)](http://id.wikipedia.org/wiki/efisiensi_(ekonomi)). Diunduh 14 Oktober 2009.
- Zainul, Ahmad. 2014. *E-Commerce dan E-Business*. <http://azainul340.blogspot.com/2014/04/e-commerce-e-business.html>. Diakses 2 Oktober 2018.

